



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. RISBUDIHARTA
2. Jabatan : VICE PRESIDENT MANAJEMEN PENGADAAN PEMBANGKIT DAN IPP EBT
3. NHK : 193100

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.465.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/55 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
5. Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 478.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 2017 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 765.450.000**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 139.636.869 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | 23.000.000 |
| Sub Total | Rp. | 3.871.586.869 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.871.586.869 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.